



Maria Yuvilanty
 Luma¹
 Maria Silvana
 Mariabel Carcia²
 Kristiana Reinildis
 Aek³

PERAN KOORDINASI BAPPERIDA DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TERHADAP PROSES PERCEPATAN PELAKSANAAN BLUD PADA PUSKESMAS DAN LABKESDA DI KABUPATEN SIKKA

Abstrak

Tujuan utama dari laporan magang ini ialah untuk mengetahui secara terperinci mengenai peran Bapperida dalam penyusunan Renstra dan dampak terhadap penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sektor kesehatan baik dari perspektif manajemen sumber daya manusia (MSDM) maupun kesehatan masyarakat. Kegiatan magang dilaksanakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, yang beralamatkan di Jalan Mawar No, 24, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan program magang dilasanakan selama satu semester dimana mulai dari tanggal 02 September sampai dengan 12 Desember 2024. Bapperida memainkan peran strategis dalam penyusunan Renstra untuk percepatan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada keempat Puskesmas dan satu Labkesda. Peran tersebut melibatkan koordinasi lintas sektor, asistensi, dan pengelolaan komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.

Kata kunci: Koordinasi; Bapperida; Pelaksanaan BLUD

Abstract

The main purpose of this internship report is to find out in detail the role of Bapperida in the preparation of the Strategic Plan and its impact on the implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) in the health sector both from the perspective of human resource management (HRM) and community health. The internship activity was carried out in the field of Government and Human Development (PPM) at the Regional Research and Innovation Development Planning Agency of Sikka Regency, which is located at Jalan Mawar No, 24, Madawat Village, Alok District, Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province. The implementation of the internship program is carried out for one semester starting from September 2 to December 12, 2024. Bapperida plays a strategic role in the preparation of the Strategic Plan to accelerate the implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) in the four Puskesmas and one Labkesda. The role involves cross-sector coordination, assistance, and effective communication management between various stakeholders.

Keywords: Coordination; Bapperida; BLUD Implementation

PENDAHULUAN

Perubahan zaman telah memunculkan berbagai tantangan yang menyebabkan kualifikasi dunia kerja berubah dengan sangat cepat, menghadapi berbagai tantangan bagi para calon lulus perguruan tinggi. Untuk menghadapi tantangan dunia kerja modern ini, serta menunjang aspek keahlian mahasiswa diperlukan keterpaduan antara pengetahuan akan teori yang dipelajari selama bangku kuliah dan pelatihan praktik dilapangan guna memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya dilapangan.

Sebagai bagian dari masyarakat intelektual, mahasiswa memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Selain dituntut untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja, mahasiswa juga harus

^{1,2,3} Universitas Nusa Nipa
 email: mariayuvilantyluma@gmail.com¹

mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman di era Revolusi Industri 4.0. Oleh karena itu, perguruan tinggi memegang peran strategis dalam memastikan mahasiswa mendapatkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga menekankan pengembangan sikap dan keterampilan. Melalui proses pendidikan yang inovatif dan adaptif, mahasiswa dilatih untuk berinovasi serta menerapkan teori yang dipelajari dalam berbagai situasi nyata, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan masa kini maupun masa depan.

Upaya perguruan tinggi dalam menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja tercermin dalam perancangan kurikulum yang relevan dan mendukung capaian pembelajaran optimal. Pendidikan yang diberikan tidak hanya mengembangkan aspek sikap dan keterampilan umum, tetapi juga keterampilan khusus yang relevan dengan karakteristik industri modern. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja yang kompeten tetapi juga individu yang mampu memberikan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan. Pendekatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang adaptif dan relevan, memastikan mereka menjadi agen perubahan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan mengenai Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM), diantisipasi menjadi jawaban atas tuntutan tersebut (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Kebijakan menteri untuk mendukung kegiatan program MBKM salah satunya yaitu Program magang dengan peraturan yang merujuk pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan (Kemendikbud, 2021)

Pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, target dan pecaiaannya.

Tujuan dari magang sendiri yaitu agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu dan mengimplementasikan ilmu yang didapati di dunia perkuliahan kedalam industri dan atau dunia kerja, serta magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dapat mengasah keterampilan lainnya, tujuan lain dari magang juga memberikan gambaran mengenai budaya kerja perusahaan.

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, pasal 15 ayat 3 menyatakan proses pembelajaran yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan huruf d bahwa dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020)

Universitas Nusa Nipa adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang melaksanakan program merdeka belajar yang salah satunya yaitu magang, Fakultas ekonomi dan bisnis melaksanakan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka, dimana pada Bapperida ini di dilaksanakan program magang sudah terjadi pada tahun ketiga.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam membantu kerja bupati dalam proses perencanaan, pembangunan serta melaksanakan riset dan inovasi daerah. Bapperida Kabupaten Sikka juga memiliki fungsi dan perannya untuk melakukan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyusun perencanaan kebijakan anggaran daerah, mengkoordinasi, mengendalikan, memantau dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) kabupaten Sikka terdapat beberapa sub bidang yaitu bidang PPED, RIDA, IWE, PSDA, dan PPM, dimana pada setiap bidangnya menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan

tupoksinya masing-masing. Dengan demikian penulis ditempatkan berada dibidang PPM. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas dan wewenang yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan dan pelatihan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat desa, Inspektorat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan, dan pencatatan, sipil, (Renstra Bapelitbang Tahun 2023-2026 FINAL-1, n.d.)

Selama menjalankan pekerjaan kantor yang diberikan para pegawai, disamping itu penulis tidak hanya mempelajari lingkungan kantor tetapi penulis mempunyai kesempatan untuk berdiskusi bersama para pegawai kantor. Dalam proses diskusi penulis menemukan adanya rencana akan dilaksanakan proses penerapan badan layanan umum daerah pada empat puskesmas dan satu labkesda yang ada di kabupaten Sikka, yang harus dilakukan telaah lebih lanjut oleh penulis serta kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh bidang PPM, penulis juga mengikuti proses persiapan tersebut.

Dalam pelaksanaannya Bapperida melaksanakan kerjasama bersama dengan berbagai OPD, termasuk puskesmas dan Laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) di kabupaten Sikka untuk mempercepat proses penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerapan BLUD pada sektor kesehatan daerah ini, yaitu dengan upaya dalam meningkatkan layanan kesehatan yang responsif, akutabel, dan berkelanjutan yang mana sesuai dengan prinsip good governance.

Penyelenggaraan BLUD di Puskesmas bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan serta meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah puskesmas dan labkesda. Akan tetapi untuk dapat menerapkan kebijakan BLUD tersebut puskesmas harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik itu persyaratan substansi, teknis, maupun administratif serta kesiapan struktur birokrasi, sumber daya organisasi, dan budaya organisasi (Herawati et al., 2022). Salah satu alasan mengapa keempat Puskemas ini didorong untuk menerapkan BLUD yaitu dilihat dengan kepesertaan BPJS paling banyak kepesertaan JKN.

Tabel 1. Data Puskesmas dan Labkesda siap BLUD

No	Nama	Jumlah Pengguna JKN
1	Puskesmas Nita	15.479
2	Puskesmas Koppeta	13.004
3	Puskesmas Waigete	18.615
4	Puskesmas Paga	10.629
5	Labkesda	-

Sumber data diperoleh dari Bapperida

Dari daftar keempat puskesmas serta satu labkesda diatas akan dilakukan proses percepatan badan layanan umum daerah (BLUD). Dimana keempat puskesmas dan satu labkesda ini, sudah memenuhi persyaratan secara substansi, teknis serta administrasi.

Oleh karena itu pemerintah mendorong transformasi puskesmas dan labkesda menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Alasan perlunya diterapkan BLUD pada puskesmas dan Labkesda disebabkan karena fleksibilitas pengadaan barang maupun jasa yang dibelanjakan dalam satu tahun anggaran harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disetujui sehingga menyebabkan puskesmas kesulitan menyesuaikan kebutuhan jika di tengah periode anggaran membutuhkan barang atau jasa yang tidak di anggarkan (Afzil Ramadian et al.,2021)

Keterbatasan lain yang dapat menghambat Puskesmas dan labkesda untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang maksimal adalah masalah ketenagakerjaan. Selain itu perlu dilakukan BLUD pada puskesmas dan labkesda agar mereka secara mandiri dalam pengelolaan keuangan tanpa perlu bergantung pada pemerintahan daerah.

Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyiratkan bahwa layanan kesehatan diberikan keleluasaan pengelolaan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penganggaran. Dengan adanya BLUD dapat memberikan peluang bagi puskesmas dan labkesda meningkatkan profesionalitas, serta mendorong puskesmas dan labkesda menerapkan enterpreneureship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. (Menteri Dalam Negeri, 2007)

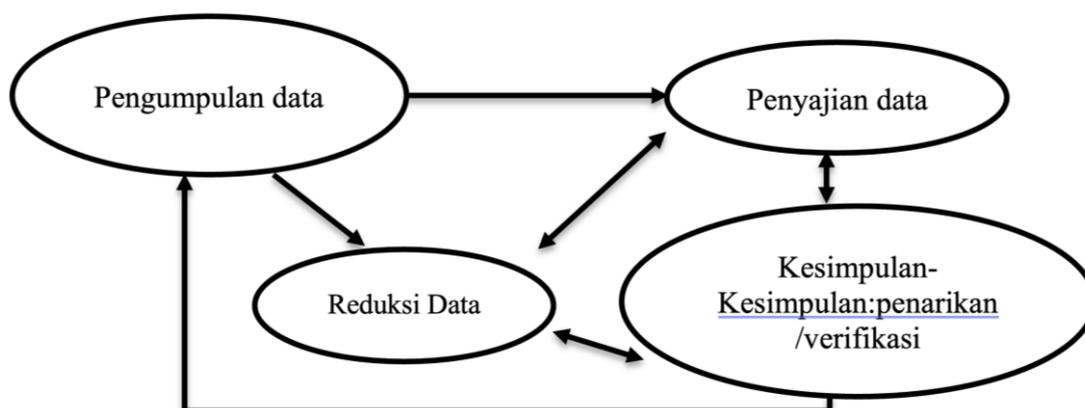
METODE

Kegiatan magang dilaksanakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, yang beralamatkan di Jalan Mawar No, 24, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan program magang dilaksanakan selama satu semester dimana mulai dari tanggal 02 September sampai dengan 12 Desember 2024.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber menggunakan beragam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai kejenuhan (Sugiyono, 2023:485). Proses analisis data melibatkan penggambaran hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang kemudian direduksi untuk memilih informasi baru, penting, dan relevan. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan bentuk, warna, sifat, dan jenis, diikuti dengan pengonstruksian hubungan antar kategori untuk menemukan tema penelitian. Analisis ini bertujuan memahami makna suatu peristiwa, memastikan keakuratan data, mengidentifikasi penyebab, memahami proses, dan menghasilkan hipotesis.

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2022:583), menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus samapi tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data (interactive model)

a) Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketigannya (tiranggulasi). Pada tahap penelitian ini penulis mengambil data sebanyak-banyaknya mengenai peran serta koordinasi Bapperida melalui wawancara.

b) Reduksi Data

Dari hasil pengumpulan data sebanyak-banyaknya maka ditahap ini penulis memilah atau pemilihan dimana lebih fokus kepenyederhanaan hal yang kurang penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan dilakukan ketika sudah menjalankan beberapa struktur bagian hingga akhirnya menemukan hasil, salah satu prosesnya yaitu dengan wawancara. Wawancara yang

dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai dua narasumber dari Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida, dengan indikator pertanyaan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut A.W. Wijaya (2000:15) dalam (Safitri et al.,2024) mengungkapkan komunikasi merupakan penyampaian informasi dan pengertian dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling memahami, yaitu kedua belah pihak, si pengirim atau komunikator dan penerima atau komunikan sama-sama memahaminya. Hal ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui suatu gagasan tersebut, tetapi yang penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan struktur pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bapperida memastikan bahwa informasi terkait penyusunan Renstra dipahami secara merata oleh semua pihak Puskesmas dan Labkesda?

Kepala Bidang PPM menjelaskan bahwa “Peran Bapperida dalam memastikan kesiapan lembaga yang akan menjadi BLUD melalui sosialisasi, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen administrasi, khususnya Renstra. Fokusnya adalah membangun pemahaman yang mendalam mengenai sistematika Renstra dan persyaratan BLUD untuk memastikan lembaga memenuhi standar yang ditetapkan”

- b. Apa hambatan utama dalam penyampaian informasi, dan bagaimana cara Bapperida mengatasinya?

Menurut Penjelasan Kepala Bidang PPM bahwa “Hambatan yang dialami dalam proses ini tidak terlalu signifikan ketika dibandingkan antara proses dan hasil yang dicapai. Meskipun terdapat beberapa hambatan, hal tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan proses penyusunan dokumen. Pada setiap tahap, tersedia media konsultasi, seperti melalui telepon, untuk membantu menyelesaikan kendala yang muncul. Secara administratif, tidak terdapat hambatan yang berarti, meskipun ada tantangan teknis dan substansi yang harus diselesaikan”.

- c. Apakah terdapat mekanisme formal yang memastikan komunikasi antara Bapperida dan Puskesmas dan labkesda yang memastikan komunikasi antara Bapperida dan Puskesmas/Labkesda tetap berjalan konsisten sepanjang proses penyusunan Renstra?

Mekanisme formal yang komunikasi antara Bapperida dan Puskesmas dan Labkesda tetap berjalan, maka disampaikan oleh Kepala Bidang PPM bahwa “Kami selalu membuka ruang diskusi dan siap memfasilitasi kebutuhan mereka kapan saja mereka datang untuk konsultasi. Ketika mereka membutuhkan penjelasan, kami memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu dilengkapi atau diperbaiki, terutama terkait isi dokumen yang disusun”.

- d. Seberapa efektif koordinasi lintas sektor dalam menjaga kesinambungan komunikasi pada setiap tahapan penyusunan Renstra?

Efektif koordinasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan maka Kepala Bidang PPM mengatakan “Efektivitas komunikasi dapat diukur dari hasil yang dicapai, yakni apakah dokumen yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi yang dilakukan selama proses penyusunan berperan penting dalam memastikan dokumen tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi proses penyusunan, kami menilai apakah isi dokumen telah sesuai dengan arahan yang diberikan. Sedangkan yang diungkapkan oleh Staf Ahli Fungsional MMIY bahwa Sejauh ini, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa koordinasi berjalan dengan baik dan efektif”

Dari hasil wawancara mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Bapperida terhadap Puskesmas dan Labkesda, maka penulis menarik kesimpulan dari pendapat masing-masing pendapat narasumber yaitu peran Bapperida dalam penyusunan Renstra untuk Puskesmas dan Labkesda ditunjang melalui sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor yang efektif, dengan mekanisme formal yang memastikan komunikasi berjalan konsisten meskipun menghadapi tantangan terkait keterbatasan SDM serta latar belakang yang berbeda, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Ndraha (2003) dalam (Sambel et al., 2023) mengungkapkan Koordinasi Interinstusional atau kesadaran pentingnya koordinasi yaitu koordinasi dibangun ke dalam setiap pekerjaan atau tugas. kesadaran adalah suatu antusiasme orang-orang dengan menurut apa yang dia yakini. Kesadaran adalah sesuatu yang sangat terkait dengan orang, Koordinasi antar unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek atas suatu proyek serbaguna.

- a. Seberapa besar kesadaran Puskesmas dan Labkesda terhadap dampak positif koordinasi pada percepatan pelaksanaan BLUD?

Dampak positif yang diberikan koordinasi pada percepatan pelaksanaan BLUD diungkapkan Kepala Bidang PPM “Kesadaran Puskesmas dan Labkesda mengenai dampak koordinasi ini adalah positif. Koordinasi selalu memberikan dampak yang bermanfaat, terutama pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan, dan perencanaan secara keseluruhan untuk implementasi BLUD. Dampak dari koordinasi terlihat dalam efektivitas penyusunan dokumen, pelaksanaan, dan perencanaan. Untuk mengukur dampaknya, kita dapat melihat hasil dokumen tersebut apakah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, koordinasi dianggap efektif”.

- b. Apakah langka konkret Bapperida untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pihak terhadap pentingnya koordinasi?

Konkret Bapperida untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen menurut pernyataan Kepala Bidang PPM , bahwa “Pertama, pengelolaan sumber daya dilakukan dengan membagi sesuai dengan kemampuan. Ini mencakup sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan kegiatan pertemuan, dan konsep yang dirancang. Pengelolaan sumber daya melibatkan perencanaan kerja, waktu kerja, dan penanganan berbagai urusan pekerjaan”.

- c. Bagaimana Bapperida mengidentifikasi dan mengatasi resistensi dari pihak-pihak yang kurang mendukung upaya koordinasi?

Bapperida mengatasi resistensi dari pihak-pihak yang kurang mendukung upaya koordinasi ini, Kepala Bidang PPM , mengungkapkan bahwa “Saat membangun diskusi budaya kerja, langkah pertama adalah komunikasi untuk menyampaikan tugas yang akan dikerjakan dan menentukan waktu serta hari yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan agar tidak ada penolakan dari pihak lain. Tahap selanjutnya adalah menyamakan komitmen bersama dengan pihak lintas sektor, menetapkan tujuan, dan yang terakhir menentukan time line agar ada prosedur yang jelas”.

- d. Apakah dukungan yang diberikan sudah cukup untuk mengatasi tantangan dalam penyusunan Renstra?

Dukungan yang diberikan oleh Bapperida dalam mengatasi tantangan dalam Renstra dijelaskan oleh Kepala Bidang PPM, yaitu “Dukungan yang pasti diberikan saat rapat koordinasi untuk memeriksa kembali kesesuaian dokumen. Apakah teman-teman di Puskesmas dan Labkesda memberikan dukungan penuh terhadap program ini? Jika mereka mendukung penuh, tidak ada hambatan teknis yang berarti. Jika ada dokumen yang perlu diperbaiki, maka perbaikan akan dilakukan”.

Dari hasil wawancara mengenai Pentingnya kesadaran Koordinasi yang dilakukan, dan dari pendapat -pendapat maka penulis menyimpulkan koordinasi yang dilakukan oleh Bapperida dengan Puskesmas dan Labkesda memiliki dampak positif dalam mempercepat pelaksanaan BLUD, terutama melalui sosialisasi, pendampingan, dan komunikasi intensif. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman terkait perencanaan, Bapperida berhasil mengatasinya dengan langkah konkret seperti pengelolaan sumber daya yang terencana, rapat koordinasi, dan komunikasi berkelanjutan. Resistensi diminimalkan melalui pendekatan diskusi yang terstruktur dan penyamaan komitmen lintas sektor. Dukungan yang konsisten dari Bapperida memastikan bahwa kendala yang muncul dapat diselesaikan secara efektif, sehingga penyusunan Renstra berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan.

3. Komitmen

Mathiset al (2001) dalam(Khairuddin, 2021)mengartikan komitmen organisasi sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan individu terhadap tujuan dan mempunyai keinginan untuk tetap menjadi bagian organisasi. Untuk mengetahui tingkat komitmen menurut definisi diatas

maka penulis juga melakukan wawancara bersama Kepala Bidang dan Staf Fungsional Ahli Muda Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yaitu dengan berbagai struktur pertanyaan:

- a. Apa indikator yang digunakan untuk menilai konsisten pihak yang terlibat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Renstra?

Menurut Kepala Bidang PPM, beliau menjelaskan bahwa “Indikator untuk menilai konsistensinya sebenarnya adalah kesepakatan dan komitmen pelaksanaannya. Sesuai dengan kehadiran dan pelaksanaan dan ketepatan kerjanya”.

Bagaimana Bapperida menangani inkonsisten dalam pelaksanaan tugas oleh pihak tertentu?

Menurut Kepala Bidang PPM, menjelaskan Bapperida menangani inkonsisten pelaksanaan tugas yaitu dengan “Kontrol instrumen kami bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan ketidakcocokan atau ketidakkonsistenan, langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi perbaikan. Jika ada ketidakkonsistenan terhadap substansi yang harus dimuat dalam dokumen, salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat koordinasi dengan tim penyusun dokumen”.

- b. Bagaimana Bapperida merancang mekanisme keberlanjutan koordinasi setelah penyusunan Renstra selesai?

Penyampaian dari Kepala Bidang PPM, mengatakan bahwa “Ketika dokumen renstra selesai maka dilanjutkan dengan produk hukum mengenai peraturan Bupati, untuk menjaga konsistensi supaya dokumen ini diterapkan maka instrumen yang digunakan yaitu kapan pelaksanaan diadakan dan tim asistensi mengasistensikan dokumen, dan melihat apakah dokumen sudah benar-benar siap untuk dilakukan penilaian, jika sudah siap maka langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan BLUD”.

- c. Apa tantangan utama dalam mempertahankan hubungan koordinasi yang solid, dan bagaimana Bapperida mengatasinya?

Menurut apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPM bahwa “Tantangan koordinasi yaitu latar belakang berbagai pihak, pemahaman konteks BLUD, Renstra, tantangan pertama yaitu samakan dulu pemahaman, perbedaan pemahaman itu dipengaruhi oleh SDM”.

Selain itu menurut penjelasan Staf Ahli Fungsional MMIY, bahwa “Sebenarnya tantangan koordinasi yang solid sebenarnya tantangannya itu dari pribadi masing-masing, kalau untuk membangun koordinasi antar perangkat daerah tidak sulit hanya ada individu-individu yang tertutup untuk melakukan koordinasi. ketika seperti ini, kalau dari sisi Bapperida atau sebagai perencanaan, sebenarnya tidak ada hambatan, karena ketika perangkat daerah dipanggil (Rapat) Bapperida mereka selalu hadir”.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan maka penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan wawancara, Bapperida menilai konsistensi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra melalui indikator komitmen, kesepakatan pelaksanaan, dan ketepatan kerja. Untuk mengatasi inkonsistensi, Bapperida menggunakan kontrol instrumen untuk memastikan dokumen sesuai dengan ketentuan, diikuti dengan koordinasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

Setelah penyusunan Renstra selesai, mekanisme keberlanjutan koordinasi dirancang melalui penerapan dokumen dalam produk hukum, asistensi lanjutan, dan evaluasi kesesuaian implementasi dengan Renstra. Selain itu, Bapperida juga memperkuat peran koordinasi intensif dengan perangkat daerah untuk memastikan komitmen dan konsistensi pelaksanaan program sesuai perencanaan.

4. Komposisi Partisipasi

Komposisi Partisipasi merupakan keterlibat aktifan dari berbagai pihak untuk melaksanakan suatu kegiatan yang disepakati.

Penulis melaksanakan wawancara dengan Kepala Bidang dan Staf Ahli Fungsional mengenai komposisi partisipasi.

- a. Bagaimana Bapperida memastikan keterwakilan seluruh lintas sektor yang relevan dalam penyusunan Renstra untuk percepatan pelaksanaan BLUD?

Menurut Kepala Bidang PPM, mengatakan “bahwa keterlibatan dalam penyusunan dokumen Renstra yaitu dari Puskesmas dan Labkesda, Dinkes, Bapperida”. Se jauh mana keterlibatan aktif stakeholder berdampak langsung pada kualitas hasil renstra yang dihasilkan?

Menurut penyampaian Kepala Bidang PPM, bahwa “ukuran sejauh mana stakeholder terlibat aktif Jadi ukurannya yaitu seberapa baik dokumen yang dikerjakan sesuai dengan arahan syarat isinya, prosesdurnya, outpunya, jadi untuk mengukur kesesuaian isi didalam dokumen”.

- b. Apakah distribusi peran dalam tim penyusun Renstra sudah mencerminkan kemampuan dan tanggungjawab masing-masing pihak?

Menurut penyampaian Kepala Bidang PPM, mengungkapkan “Kita akan memilih tim kerja sesuai dengan tugas dan wewenangannya serta bidangnya, tim yang bekerja itu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”. Sedangkan menurut pengungkapan Staf Ahli Fungsional MMIY bahwa “Kalau untuk distribusi peran dalam penyusunan Renstra sudah berjalan baik”.

- c. Bagaimana Bapperida mengevaluasi efektivitas kontribusi setiap stakeholder dalam proses penyusunan Resntra?

Hasil wawancara bersama dengan Kepala Bidang PPM, beliau mengatakan bahwa “Kalau evaluasi pasti menggunakan ideal otomatis menggunakan instrumen evaluasi yang berisi ceklis data-data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi”. Sedangkan penyampaian dari Staf Ahli Fungsional MMIY yaitu “cara untuk mengevaluasi yaitu dengan melihat hasil yang dicapai serta ketepatan pelaksanaan”.

Dari pendapat narasumber diatas dapat disimpulkan yaitu Bapperida memastikan keterlibatan lintas sektor yang relevan dalam penyusunan Renstra melalui koordinasi antar perangkat daerah, termasuk Puskesmas, Labkesda, Dinkes, dan organisasi terkait. Keterlibatan aktif stakeholder berkontribusi langsung terhadap kualitas dokumen Renstra, terutama dalam pemenuhan standar isi, prosedur, dan output yang dihasilkan. Distribusi peran dalam tim penyusun Renstra telah berjalan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Evaluasi efektivitas kontribusi dilakukan melalui instrumen evaluasi dan analisis hasil yang dicapai, memastikan keselarasan dengan tujuan BLUD.

5. Kesepakatan

Charles Knappet al.,dalam(Andri Cahyanto, 2021)mendefinisikan kesepakatan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih yang tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi juga saling memahami. Seseorang atau keduanya dapat melakukan sesuatu. Definisi ini tidak hanya menjelaskan arti kesepakatan, tetapi juga menetapkan beberapa unsur utama yang harus dipenuhi dalam sebuah kesepakatan, yaitu:

- a. Adanya pemahaman dan persetujuan tentang fakta antara kedua belah pihak.
- b. Persetujuan tertulis: Kesepakatan harus dituangkan secara tertulis untuk memberikan kejelasan dan bukti formal.
- c. Hak dan kewajiban: Pihak-pihak yang membuat kesepakatan harus memiliki kewenangan hukum dan tanggung jawab dalam melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Dari pengertian yang dijabarkan oleh para ahli diatas maka penulis melakukan wawancara dengan struktur wawancara sebagai berikut:

- a. Apakah kesepakatan yang dihasilkan dalam koordinasi sudah didokumentasikan secara sistematis, dan bagaimana validitasnya diuji?

Menurut penjelasan dari Kepala Bidang PPM, mengatakan bahwa “Kesepakatan harus berbentuk secara tertulis tidak dilakukan tapi melaksanakan apa yang disepakati dengan mencatat di kertas kerja, maka poin itulah yang sebenarnya menjadi komitmen kita untuk mengontrol dan mengevaluasi apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang diberikan atau tidak?”

- b. Apakah indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas kesepakatan yang tercapai?

Menurut Kepala Bidang PPM mengatakan bahwa “Indikator utama kesesuaian dokumen berdsarkan hasil kesepakatan, arahan, serta hasil koordinasi akan berisi poin-poin yang diarahkan, catatan-catatan yang diberikan itu yang harus diperbaiki, ketika tim penyusun

sudah merubah dalam dokumen dilakukan itu efektif atau berjalan baik. Ada tiga proses yaitu penyampaian pelaksanaan hasil agar efektif”. Sedangkan menurut pendapat Staf Ahli Fungsional MMIY, beliau mengatakan bahwa “indikator yang dilihat yaitu berapa persen keberhasilan atau berapa persen dari program kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh Puskesmas dan Labkesda tadi.

- c. Apa langkah yang diambil Bapperida jika terjadi penyimpangan dari kesepakatan yang telah dicapai?

Menurut Kepala Bidang PPM mengatakan bahwa “Instrumen yang digunakan yaitu koordinasi, perbaikan dikasih arahan, intinya kekuatan koordinasi, semakin sering koordinasi semakin baik hasil yang dicapai”.

- d. Bagaimana sistem monitoring memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan secara konsisten?

Menurut Kepala Bidang PPM mengatakan bahwa “Sistem yang digunakan yaitu menggunakan instrumen, Jika evaluasi maka harus menggunakan instrumen sebelum melakukan evaluasi maka dilakukan monitoring sementara berjalan. Dari instrumen tersebut kita mengetahui hasil kesepakatan yang secara konsisten”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Kesepakatan merupakan elemen penting dalam proses koordinasi penyusunan Renstra untuk percepatan pelaksanaan BLUD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, beberapa poin kesimpulan dapat diambil:

1. Pendokumentasian Kesepakatan:

Kesepakatan harus didokumentasikan secara tertulis sebagai bentuk komitmen untuk mempermudah evaluasi dan monitoring. Pelaksanaan kegiatan oleh Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan Renstra menjadi bukti nyata keberlanjutan kesepakatan.

2. Indikator Kualitas Kesepakatan:

Kualitas kesepakatan diukur melalui kesesuaian dokumen hasil koordinasi dengan arahan yang diberikan, serta persentase keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai Renstra.

3. Penanganan Penyimpangan

Jika terjadi penyimpangan, langkah Bapperida meliputi penguatan koordinasi, asistensi, perbaikan dokumen, hingga pengurangan anggaran jika diperlukan.

4. Sistem Monitoring:

Monitoring dilakukan menggunakan instrumen evaluasi untuk memastikan kesepakatan dipatuhi secara konsisten. Bapperida secara rutin memantau pelaksanaan program di Puskesmas dan Labkesda agar tetap sesuai perencanaan.

- a. Peran Bapperida Dalam Penyusunan Resntra BLUD

Bapperida memiliki peran yang sangat penting dalam proses penerapan BLUD di Puskesmas dan Labkesda. Keterlibatan Bapperida dalam proses ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat (PPM), yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka. Untuk menyukseskan pelaksanaan BLUD, Bapperida memfasilitasi berbagai kegiatan, mulai dari rapat kesepakatan pembagian tugas hingga studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menerapkan BLUD. Selain itu, Bapperida juga berperan dalam proses penyusunan dokumen terkait BLUD, khususnya dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Proses ini diawali dengan kesepakatan bersama dan dirancang menggunakan time line untuk memantau setiap progres penyusunan secara sistematis. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahap yang melibatkan koordinasi intensif.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam laporan ini dihasilkan dari analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang dan Staf Ahli Fungsional di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) di Bapperida Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan bersifat kualitatif dan mencerminkan pandangan serta pengalaman narasumber selama pelaksanaan kegiatan koordinasi terkait penyusunan Renstra untuk percepatan implementasi BLUD.

Bapperida memainkan peran strategis dalam penyusunan Renstra untuk percepatan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada keempat Puskesmas dan satu Labkesda. Peran tersebut melibatkan koordinasi lintas sektor, asistensi, dan pengelolaan komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.

Dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), tantangan seperti keterbatasan kapasitas SDM di tingkat pelaksana dapat diatasi melalui langkah-langkah strategis berupa sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan intensif. Dari perspektif kesehatan masyarakat, transformasi menjadi BLUD memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan operasional, yang berdampak positif pada kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) diterapkan dalam proses penyusunan Renstra, mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Analisis SWOT menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan komitmen stakeholder merupakan kekuatan utama, sedangkan tantangan utama meliputi perbedaan pemahaman antar sektor dan resistensi terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, peran koordinasi yang dilakukan oleh Bapperida terbukti efektif dalam memastikan dokumen Renstra memenuhi standar yang ditetapkan, mendukung keberhasilan implementasi BLUD, serta mempercepat pencapaian tujuan strategis sektor kesehatan di Kabupaten Sikka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzil Ramadian, Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M., Usep Suhud, M.Si., Ph. D. (2021). *Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara* (pp. 1–191).
- Andri Cahyanto. (2021). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 183–196. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i2.200>
- Bala, R. P. (2023). Fleksibilitas Badan Layanan Unit Daerah (Blud) Dan Implementasinya Untuk Mutu Dan Daya Saing. *Janaka: Jurnal Pengabdian ...*, 4(2), 40–46. <http://ejournal.lppm-stieatmabhakti.id/index.php/JANAKA/article/view/349%0Ahttps://ejournal.lppm-stieatmabhakti.id/index.php/JANAKA/article/download/349/219>
- Cindoswari Ageng Rara. (n.d.). 106548-ID-analisis-struktur-jaringan-komunikasi-da.
- Handoko, T. H. (2003). Implementasi Penyusunan Rencana Strategis. 14–40.
- Herawati, Y. T., Baroya, N., Sandra, C., Sulistiyani, S., Ramani, A., Ningrum, P. T., & Akbar, K. A. (2022). Kesiapan Puskesmas Menuju Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Di Wilayah Kabupaten Jember. *Ikesma*, 18(2), 127. <https://doi.org/10.19184/ikesma.v18i1.31491>
- Hutami, S. Y. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi. 1–70.
- Ii, B. A. B., & Teori, A. K. (n.d.). *Taliziduhu Ndrahlma*, Ilmu Pemerintahan Baru (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 290. Ibid., 02.
- Kuangan, K. (2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengeluaran Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Perbendaharaan, 1–93.
- Khairuddin, K. (2021). Komitmen Organisasi Ditinjau Dari Masa Kerja. *Jurnal Social Library*, 1(2), 33–38. <https://doi.org/10.51849/sl.v1i2.31>
- Khanafi, K., & Hidayatullah, H. (2022). Manajemen Motivasi Islam. *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 12–26. <https://doi.org/10.61456/tjiec.v2i2.16>
- Menteri Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. *Jdih Bpk*, 1–39.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 61 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. <https://Luk.Staff.Ugm.Ac.Id/Atur/Blu/Permenkeu61-2007PengelolaanKeuBLUDAerah.Pdf>, 3.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Nomor, U. R. I., Perbendaharaan, T., Dengan, N., Tuhan, R., Maha, Y., Presiden, E. S. a, Indonesia, R., Negara, U. D., Pendapatan, A., Negara, B., Daerah, B., Indonesia, U. P., Tahun, S., Nomor, U., Negara, L., Negara, P., Negara, K., Lembaran, T., Nomor, N., ... Undang-undang, D. (2004). *Indische Comptabiliteitswet*. 1968, 1–37.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. *World Development*, 1(1), 1–53.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, Nomor 65(879), 2004–2006.
- Perda. (2021). Lembaran daerah kabupaten kampar tahun 2021 nomor 4. 1–134.
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No 77 Tahun 2020, 1–445.
- Permenkes No.25. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. 1–13.
- PP no 58 thn, 2008. (2005). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 105.
- Purhantara, W. (2019). Menciptakan Organisasi Yang Kreatif. *Jurnal Economia*, 8(2), 153–163.
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- REGITA, A. (2019). Pengaruh Konten Youtube Atta Halilintar Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Remaja (Survey Pada Siswa SMP PGRI 2 Ciledug). <http://repo.usni.ac.id/38/>
- Renstra Bapelitbang Tahun 2023-2026 FINAL-1. (n.d.).
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Rusdiana, A. (2020). Mata Kuliah Manajemen Strategik. 1–301.
- Rusniati, & Haq, A. (2014). Perencanaan Strategis dalam Perspektif Organisasi. *Intekna*, 14(2), 102–209. <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/view/178>
- Safitri, B., & Mujahid, N. S. (2024). Komunikasi Efektif dalam Organisasi. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(3), 309–316. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i3.318>
- Sambel, G. G., Monintja K, D., & Kumayas, N. (2023). Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotamobagu. *Eksekutif*, 3(2), 1–9.
- Sayuga, H. D., Ambarwati, A., & Fatmawati, R. (2024). Pengaruh Person-Job Fit dan Person-Organization Fit Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sumatraco Langgeng Makmur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 7(2), 145–163. <https://doi.org/10.25139/jiabi.v7i2.5772>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Studi Kasus*. Bandung: Alfabeta.